

# Kiprah Aktif DPR RI di Dunia Internasional



**ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY:** Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berfoto bersama dengan Ketua DPR RI selaku Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA) 2009 Marzuki Alie, Presiden pertama APA Haddad Adel, para kepala delegasi peserta saat peresmian pembukaan APA ke-4 di Gedung Merdeka, Jl. Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, awal Desember lalu. Pertemuan Parlemen Se-Asia keempat tersebut diikuti oleh 174 peserta dari 26 negara serta tiga organisasi parlemen peninjau.

Melalui studi banding pulalah anggota DPR dapat lebih memiliki wawasan komprehensif dalam melaksanakan tugasnya.

**D**EWAN Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang hidup di tengah lingkungan antar-bangsa. Mengingat itu, DPR pun memiliki peranan untuk turut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan amanat konstitusi RI.

Selain melakukan sejumlah tugas konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga bertugas mendorong penguatan diplomasi ke luar negeri dengan menjalankan politik luar negeri, baik dalam kegiatan bilateral maupun multilateral. Untuk mewujudkan hal itu, alat kelengkapan DPR RI, yakni anggota DPR, pun berpartisipasi aktif dalam organisasi politik internasional.

Terbukti, kini mereka menduduki sejumlah jabatan di dunia internasional. Di antaranya di Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC member states (PUIC), dan Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (Fasped).

Menurut Sekretaris Jenderal

DPR RI Nining Indra Saleh, DPR juga menjadi inisiator debat khusus mengenai isu Myanmar di IPU dan meyakinkan parlemen anggota ASEAN untuk mendukung penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar.

DPR juga merupakan satu dari tujuh parlemen yang menjadi contoh studi IPU mengenai Millenium Development Goal (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium, karena mempunyai komisi khusus panitia kerja MDGs. Selain itu, anggota DPR juga berperan aktif dalam organisasi internasional seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly), APFF (Asia Pacific Parliamentary Forum), dan ASEP (Asia-Europe Parliamentary Partnership).

Saat ini DPR juga telah membentuk 54 grup kerja sama bilateral dengan parlemen negara sahabat yang melibatkan 560 anggota DPR. Nining menambahkan, agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, anggota DPR membutuhkan

**“** Setiap anggota delegasi DPR yang dikirim ke luar negeri juga harus berpartisipasi secara aktif dalam persiapan kunjungan ke luar negeri dan harus mengikuti seluruh program kegiatan dengan aktif.”

**Nining Indra Saleh**  
Sekretaris Jenderal DPR RI

masuk untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Oleh karena itu pulalah dilakukan sejumlah studi banding ke berbagai parlemen dan institusi pemerintah serta swasta di negara lain. Tujuannya agar dapat menerima penjelasan langsung dalam mengelola kegiatan dan sumber daya di negara lain.

“Pada era globalisasi seperti

ini, studi banding merupakan metode yang layak dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dan mengetahui pengalaman negara lain dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Dengan kunjungan langsung serupa itu, diharapkan anggota DPR mendapatkan wawasan komprehensif dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Nining.

Namun, untuk mengirimkan anggota DPR atau delegasi untuk studi banding ke luar negeri, Nining menandaskan, terlebih dahulu harus mematuhi beberapa aturan. Di antaranya pedoman pengiriman delegasi ke luar negeri dan kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR RI 2011 hasil kesepakatan dari pertemuan konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi DPR dan BURT.

Berdasarkan Pasal 143 Tata Tertib DPR, anggota DPR atau delegasi yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri harus dilaksanakan secara selektif. Sebelumnya, delegasi/anggota harus terlebih

dulu menyampaikan *term of references* (ToR).

TOR yang diserahkan kepada pimpinan DPR itu memuat urgensi, kemanfaatan, dan keterkaitan antara negara tujuan dengan materi UU yang akan dibahas. “Setiap anggota delegasi DPR yang dikirim ke luar negeri juga harus berpartisipasi secara aktif dalam persiapan kunjungan ke luar negeri dan harus mengikuti seluruh program kegiatan dengan aktif,” papar Nining.

#### Efisiensi anggaran

Setiap anggota DPR RI atau delegasi yang ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dapat membatalkan kunjungannya. Hal itu bila mereka tengah membahas pula sejumlah RUU yang memiliki tingkat urgensi tinggi dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran.

Misalnya, menurut Nining, pembahasan RUU tentang perubahan atas suatu UU yang substansi perubahan kurang dari 50%, RUU kumulatif ter-

buka meliputi RUU tentang pengesahan perjanjian internasional, RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi, RUU tentang APBN, RUU tentang pembentukan daerah provinsi/kabupaten/kota, serta RUU tentang penetapan perpu menjadi UU.

“Selain melakukan kunjungan ke luar negeri, anggota DPR atau delegasi juga dapat mengundang sejumlah tamu kehormatan,” papar Nining.

Para tamu itu, di antaranya, duta besar atau perwakilan RI di luar negeri, kementerian luar negeri atau duta besar negara sahabat, lembaga penelitian yang memiliki kompetensi, dan perguruan tinggi di luar negeri melalui duta besar RI untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Kemudian sesuai dengan amanah pimpinan DPR, setiap hasil kunjungan ke luar negeri, delegasi DPR seharusnya menginformasikan kepada publik mengenai hasil dan manfaat yang dicapai untuk meraih kepercayaan publik. (S-25).

## Berperan di Kancah Internasional Membawa Banyak Manfaat

MASUKNYA anggota DPR di dunia politik internasional tentu membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Terlebih, bila anggota dewan juga terlibat dalam organisasi parlemen yang terdiri dari berbagai negara. Keterlibatan anggota DPR seperti dalam organisasi Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC) dapat memberi pelajaran mengenai permasalahan di dunia parlemen internasional dan solusinya.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada *Media Indonesia*, di Jakarta. Dia mencontohkan, posisi yang diisi Ketua Komisi I DPR RI (periode 2004-2009) Theo L Sambuaga sebagai Ketua Komisi Politik, Keamanan Internasional, dan Perlucutan Senjata IPU membawa Indonesia menjadi lebih berkembang

dan dikenal.

“Dengan begitu, citra Indonesia juga akan dikenal baik di tingkat parlemen internasional. Terlebih bila Indonesia menjadi salah satu ketua. Karena, dapat pula menyuarakan kepentingan nasional dan Indonesia termasuk dalam kawasan negara yang lebih berkembang lagi,” kata Ikrar.

Tak hanya memberi keuntungan bagi Indonesia, menurut Ikrar, anggota DPR melalui wakilnya di organisasi internasional juga telah menggegolkan beberapa isu internasional untuk dibahas di forum IPU. Di antaranya, sambung dia, isu perdamaian di Palestina yang menjadi bahasan dan kemudian diadopsi sebagai resolusi.

Puncaknya, lembaga PBB United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) telah meminta satu nama dari anggota DPR untuk menjadi *vocal point* mewakili ang-

**Keberhasilan anggota DPR dalam diplomasi antarparlemen di dunia internasional dilihat dari sejumlah jabatan penting yang dipercayakan kepada anggota DPR dalam organisasi politik internasional:**

#### 1. Inter-Parliamentary Union (IPU)

- Ketua DPR Marzuki Alie sebagai Ketua Asia Pasifik Geopolitik group IPU
- Ketua BKSAP DPR periode 2004-2009 Abdillah Toha sebagai anggota Executive Committee IPU
- Wakil Ketua BKSAP DPR periode 2009-2014 Nurhayati Ali Assegaf sebagai President of IPU Coordinating Committee of Woman Parliamentarians

#### 2. Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)

- Ketua DPR Marzuki Alie sebagai Presiden Konferensi ke-7 PUIC 2012-2013
- Ketua BKSAP DPR periode 2009-2014 Hidayat Nur Wahid sebagai anggota Executive Committee PUIC

#### 3. Ketua DPR Marzuki Alie sebagai Presiden pertama Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (Fasped) 2008-2010.

gota parlemen se-Asia Pasifik dalam badan tersebut.

Di PUIC, anggota DPR juga berhasil meyakinkan anggota lainnya untuk mengamendemen statuta PUIC perihal keikutsertaan negara-negara yang memiliki komunitas Islam agar dapat bergabung menjadi anggota PUIC.

Negara-negara tersebut antara lain China, Rusia, dan

India. Amendemen ini dilakukan agar PUIC memiliki peranan lebih besar dalam politik global untuk memecahkan permasalahan umat Islam di dunia.

Peran aktif DPR dalam lembaga internasional juga terbukti dalam keikutsertaannya dalam Parliamenterian for Global Action (PGA) yang mendorong terwujudnya perdamaian,

demokrasi, hukum, hak asasi manusia, pembangunan yang berkelanjutan, dan populasi. Komitmen melawan korupsi internasional dituangkan dalam keikutsertaan DPR di Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).

Ikrar juga menambahkan, anggota dewan yang aktif di dunia parlemen internasional

memiliki kesempatan berinteraksi dengan berbagai anggota parlemen dari berbagai negara. Sehingga, sambung dia, mereka jadi lebih tahu apa yang tengah terjadi di dunia internasional, permasalahan, isu internasional, dan juga solusinya.

“Partisipasi aktif anggota DPR di lembaga politik internasional seperti IPU dan PUIC juga membawa masukan yang berguna bagi Indonesia. Hal-hal yang dibahas juga beragam dan dapat menjadi pembelajaran seperti mengenai terorisme, kemiskinan, perdagangan internasional, dan dapat menjadi bekal untuk membangun Indonesia,” ujar Ikrar.

Anggota DPR juga berperan aktif di Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Di sana mereka dapat mengembangkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sehingga dapat mengukuhkan posisi DPR RI

di percaturan politik internasional. Menariknya, kerja sama negara-negara Asia Pasifik itu diprediksi dapat menyaingi kekuatan aktor-aktor politik lama, seperti negara-negara maju dan berkuasa di kawasan Eropa dan Amerika.

Tidak hanya berkecimpung dalam lembaga internasional, DPR RI juga terus membangun hubungan di antara kedua negara (bilateral) yang disebut sebagai Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI. GKSB DPR RI itu, antara lain, dengan parlemen Italia, Jepang, Arab Saudi, Mesir, dan Kuba.

GKSB DPR RI mencakup puluhan kerja sama bilateral dengan puluhan negara lainnya. GKSB merupakan bentuk dari kepedulian kerja sama di antara dua negara agar selalu tercipta koordinasi yang baik, khususnya kedua pihak, umumnya untuk dunia internasional. (S-25)